

## **Kepemimpinan Walikota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara**

Helen T.W.M<sup>1</sup> dan Fernandes Simangunsong<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<sup>2</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri

\*Email Korespondensi: [helentwentymargareth@gmail.com](mailto:helentwentymargareth@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the mayor leadership in realizing the vision based on the development minister in the country number 86 years 2017, To review and analyze contributing factors and factors which hinder. That is the theory theory used leadership Ralp M Stogdil. Informants in this research determined by purposive sampling techniques, using interviews data collection techniques , observation and documentation. Research leadership to the mayor the development vision of Sibolga City have done many change through project implementation and reached development goals, But there were employees and people undisciplined and did not participate in the implementation of development programs. By factors in support of the mayor with communication between opd and the community, the ability, political support, and the potential of Sibolga City. The barrier is the limited budget , the community resources , and the size of the narrow Sibolga City. The efforts made which is improving coordination and transparency, provide guidance and supervision, cooperate and use information technology. To the mayor writer with opd improve performance, into improvement that have not been to indicators.

**Keyword :** Leadership, The development vision, Ministerial regulation

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Teori yang digunakan yaitu teori kepemimpinan Ralp M Stogdil. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan Induktif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian yaitu Kepemimpinan Walikota dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga sudah banyak melakukan perubahan melalui pelaksanaan program dan mencapai sasaran pembangunan, namun masih ditemukan para pegawai dan masyarakat yang tidak disiplin dan tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Faktor pendukung yaitu Komunikasi antar walikota dengan OPD dan Masyarakat, Kemampuan, dukungan Politik, dan Potensi Daerah Kota Sibolga. Faktor penghambat yaitu Keterbatasan Anggaran, rendahnya SDM masyarakat, dan luas Wilayah Kota Sibolga yang Sempit. Upaya yang dilakukan yaitu Meningkatkan Koordinasi dan transparansi, Melakukan pembinaan dan pengawasan, Menjalin Kerjasama serta memanfaatkan teknologi informasi. Saran dari penulis yaitu Walikota bersama OPD

---

meningkatkan kinerja, dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap indikator yang belum terpenuhi.

**Kata Kunci:** Kepemimpinan, Visi Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri

.

## **Pendahuluan**

Kepemimpinan merupakan suatu proses dan seni untuk menciptakan sebuah interaksi yang mempengaruhi para pengikutnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan diperlukan untuk menciptakan keteraturan dan kesesuaian antara pemimpin dengan para pengikutnya. Menurut Ordwey Tead mengemukakan jika "Kepemimpinan sebagai "the activity of influencing people to cooperate toward some goal which they to find desirable" artinya kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam rangka mencapai yang mereka kehendaki" (Djaenuri. 2015).

Menurut George R. Terry menyatakan bahwa "Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka menyukai untuk berusaha dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok atau organisasi". Dalam melaksanakan kepemimpinan dibutuhkan kekuasaan dan wewenang untuk menciptakan sebuah kepatuhan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Kemudian dibutuhkan pula kemampuan, sebab kemampuan yang matang akan menumbuhkan rasa percaya para pengikut dan masyarakat terhadap pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu menjadi panutan, fasilitator, sebagai mitra kerja dan juga sebagai penyelesai konflik artinya bahwa pemimpin harus dapat mendengarkan, merasakan, menanggapi, mewujudkan keinginan, aspirasi, tuntutan dan kepentingan masyarakat dan organisasi sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat (Kartono. 2016).

Konteks kepemimpinan dalam paper ini adalah kepemimpinan kepala daerah, dimana kepemimpinan kepala daerah dibagi yaitu di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, di tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati dan di tingkat kota dipimpin oleh walikota. Kepala daerah memiliki tugas dan fungsi yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat 1 yaitu:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pimpinan daerah memiliki tugas yaitu menjalankan dan melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana fungsi pemerintahan terdiri atas fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pengaturan. Dari keempat fungsi pemerintahan tersebut, paper ini membahas terkait dengan kepemimpinan walikota dari segi fungsi pembangunan, dimana pelaksanaan fungsi pembangunan memiliki tujuan untuk menciptakan daerah yang maju dan sejahtera. Dalam menjalankan fungsi pembangunan tersebut seorang kepala daerah perlu merumuskan sebuah visi pembangunan. Visi pembangunan merupakan harapan dan cita-cita daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Visi pembangunan ini tertuang dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Penyusunan dokumen RPJMD didasarkan pada potensi daerah sesuai dengan perkembangan daerah dan nasional. Dalam RPJMD terdapat program, kegiatan dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, untuk membangun sarana dan prasarana, membangun potensi ekonomi dan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan potensi unggulan yang ada disana.

Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa rancangan RPJMD yang diajukan oleh walikota akan dikonsultasikan kepada gubernur dan hasil konsultasi tersebut diperlukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal Dokumen RPJMD, dimana Penyusunan Dokumen RPJMD dikoordinasikan bersama BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan dalam penyusunan dokumen RPJMD, didalamnya terdapat visi pembangunan kepala daerah dan dalam menentukan kebijakan dan penilaian dalam pelaksanaannya dibantu sepenuhnya oleh BAPPEDA dan dieksekusi oleh seluruh Perangkat Daerah.

Penelitian ini mengangkat tentang kepemimpinan Walikota Sibolga yaitu bapak Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM., dimana dalam kepemimpinannya, Walikota Sibolga memiliki visi pembangunan yakni “Mewujudkan Sibolga Yang Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”. Visi tersebut disusun berdasarkan potensi Kota Sibolga yang dominan di bidang perikanan laut dan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga-Provinsi Sumatera Utara. Dalam mewujudkan visi pembangunan tersebut diperlukan anggaran yakni Pada tahun 2018 total alokasi belanja daerah Kota Sibolga yaitu sebesar Rp 670.105.520.000 yang dialokasikan untuk Belanja Tidak

Langsung (BTL) sebesar Rp 293.106.670.000 (43,74%) dan untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 376.998.850.000 (56, 259%) sedangkan pada tahun 2019 alokasi belanja daerah kota sibolga sebesar Rp 581.264.120.000 yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 252.007.220.000 (43,35%) dan untuk alokasi Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 329.256.900.000 (56,64%). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan dalam mewujudkan visi pembangunan dalam masa kepemimpinan Walikota Sibolga. Dalam kepemimpinan beliau yang berdasarkan visi yang ditetapkan, telah banyak pencapaian yang beliau raih untuk mewujudkan kota sibolga yang maju dan berdaya saing yaitu memperoleh prestasi dan pencapaian bidang Sumber Daya Manusia, Indeks Pembangunan Manusia Meningkat, Angka Melek Huruf Meningkat, masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan (SJSN) untuk tahun 2019 mencapai 101,16%. Disisi lain, pada bidang Infrastruktur, panjang jalan kota dalam kondisi baik dan sedang, dan jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat air minum melalui SPAM sebesar 72,30 %, meriah peringkat 2 (dua) terbaik di Provinsi Sumatera Utara.

Pada level nasional, Kota Sibolga mendapat Kota Peduli HAM 2019, kota Sehat “Swasti Saba Padapa”, Harapan II Pemerintah daerah terbaik dalam kemandirian fiskal, kota layak anak kategori pertama, meraih BKN AWARDS 2019, pemetaan indeks daya saing daerah, pemenang ketiga kategori outcome kesehatan, pemenang kedua kategori ketetapan alokasi ekonomi, ASIA BEST MAYOR OF THE YEAR 2019 pada ajang ASIA GLOBAL AWARDS 2019, dan penghargaan menteri kesehatan dengan 100 % puskesmas terakreditasi. Di tingkat Provinsi Sumatera Utara antara lain TPID terbaik tahun 2019 kategori Indeks Harga Konsumen, juara I guru berprestasi dan mewakili Provinsi Sumatera Utara ke tingkat nasional, juara II jenjang SD dan juara III jenjang TK pada pemilihan kepala TK, SD, SMP Berprestasi, juara I lomba Pamong Belajar pada SKB, medali perunggu pada olimpiade siswa bidang IPS SMP/MTS.

Pemerintah Kota Sibolga juga meraih opini WTP atas laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019, juara III perencanaan pembangunan daerah, juara I tenaga kesehatan teladan kategori tenaga kesehatan masyarakat, juara I tenaga kesehatan teladan kategori tenaga perawat, dan juara I tenaga kesehatan teladan kategori bidan. Pada tahun 2020, dibawah Kepemimpinan Walikota Sibolga, Sibolga juga meraih pencapaian yakni memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2020 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga dibawah Kepemimpinan Bapak Drs. H.M. Syarfi Hutauruk, MM terdapat permasalahan diantaranya yaitu kinerja SKPD yang sering tidak tepat waktu dalam pelaksanaan Program, kegiatan dan

subkegiatan, keterlambatan dalam menyampaikan pelaporan pembangunan, dan banyaknya kegiatan yang bersifat copy-paste seperti kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya.

Selain itu capaian akuntabilitas Kota Sibolga masih belum terwujud dalam mewujudkan visi pembangunan, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1 Target Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Kota Sibolga**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4
2016	C	CC	46,40
2017	C	CC	50,01
2018	CC	Tidak di Nilai	-
2019	B	C	49,6

Sumber : LKPj Kota Sibolga 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian nilai akuntabilitas kinerja hanya tercapai pada tahun 2017, sedangkan pada tahun 2016, 2018 dan 2019 nilai capaian akuntabilitas kinerja tidak tercapai. Selain itu, angka kemiskinan juga merupakan hambatan yang dialami Walikota dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 2 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Sibolga**

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
		Jumlah	persentase
1	2	3	4
2014	342.238	10,570	12,26
2015	355.225	11,640	13,48
2016	391.681	11,540	13,30
2017	413.454	11,910	13,69
2018	415.478	10,810	12,38

Sumber : LKPj Kota Sibolga 2019

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin Kota Sibolga dari tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan tren yang meningkat dari 10.570 jiwa penduduk miskin menjadi 10.810 jiwa pada Tahun 2018 dengan pengangguran tertinggi pada tahun 2017 sebesar 11.910 jiwa. Selain itu permasalahan yang dialami untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga adalah sumber daya manusia masyarakat Kota Sibolga masih rendah dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota terdekat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3 IPM Kota Sibolga di Bandingkan dengan Kabupaten/Kota Terdekat Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Komponen IPM				
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata lama sekolah	Pengeluaran per kapita	IPM
2	3	4	5	6	7
Padang Sidempuan	68,73	14,51	10,63	10795	74,38
Tapanuli Utara	68,11	11,36	9,65	11607	72,91
Sibolga	68,36	13,13	9,91	11405	72,65

Sumber : diolah oleh penulis

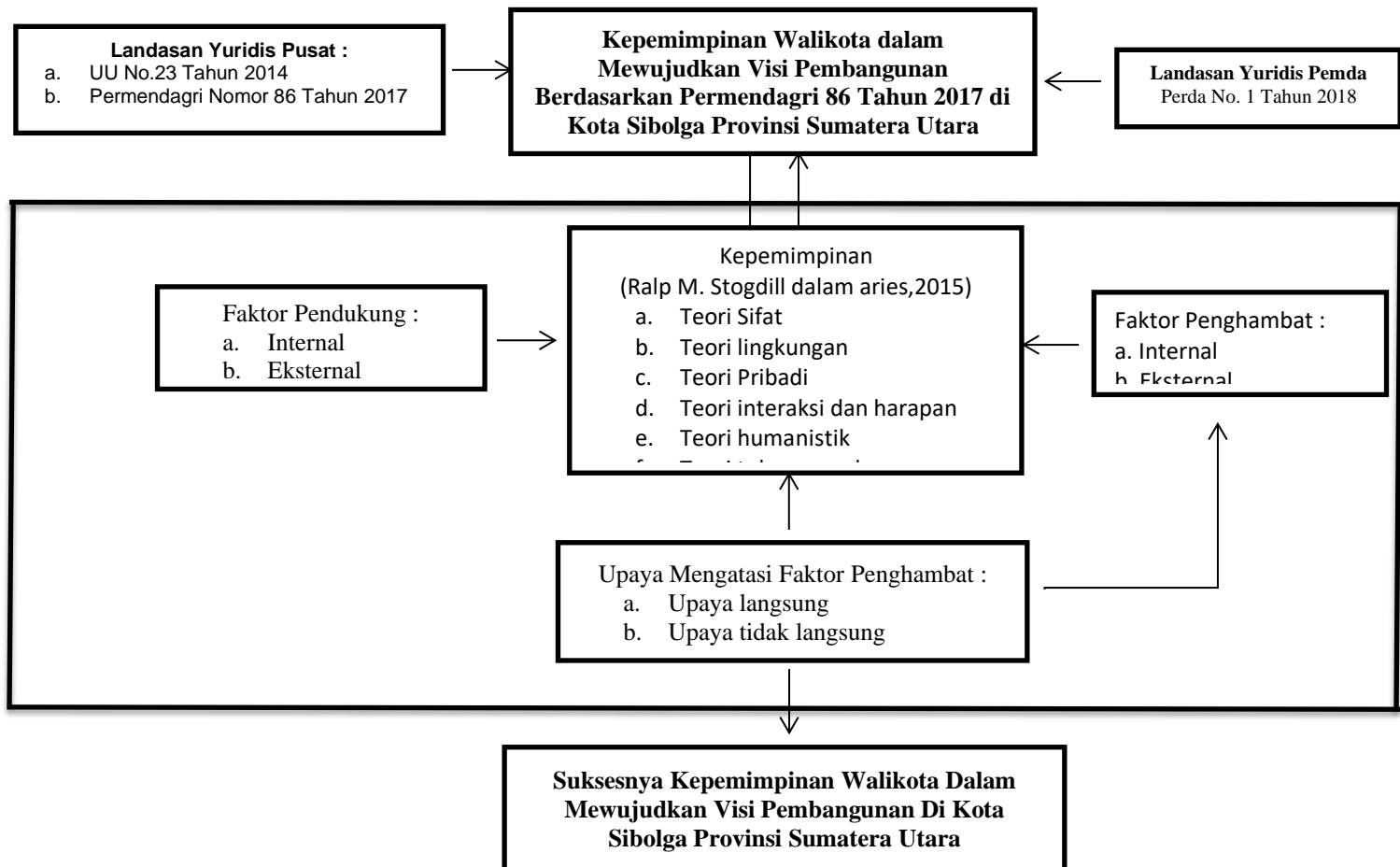
Kajian ini memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Kota Sibolga, perlu ditingkatkan, karena masih jauh di bandingkan dengan beberapa kota yang ada di Provinsi Sumatera utara, hal tersebut di dasarkan pada data yang tertuang di tabel diatas, yang mana IPM Kota Sibolga dibandingkan dengan kabupaten/kota terdekat masih rendah yaitu sebesar 72,65 sedangkan IPM Kota Padang Sidempuan lebih tinggi yaitu sebesar 74,38 dan IPM Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 72,91, dalam kondisi tersebut perlu dilihat aspek kepemimpinan dalam pemerintah apakah memiliki kapasitas atau tidak dalam memimpin sebuah daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka tersusunlah paper penelitian ini yang berjudul “Kepemimpinan Walikota Dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara”.

Pelaksanaan kepemimpinan menurut Ralp M Stogdil mengungkapkan ada 6 (enam) sub tema yaitu teori sifat, teori lingkungan, teori pribadi, teori interaksi, teori humanistik dan teori tukar menukar. Sub tema dari teori sifat terdiri atas sifat, perangai dan kepemimpinan, sub tema dari teori lingkungan terdiri atas waktu, tempat kerja, dan keadaan, sub tema dari teori pribadi terdiri atas berorientasi pada tugas, menjalin kerjasama, berorientasi pada bawahan, sub tema dari teori interaksi terdiri atas aksi, reaksi, dan komunikasi. Sub tema dari teori humanistik terdiri atas motivasi, dan kebutuhan, dan sub tema dari teori tukar menukar terdiri atas memberi dan menerima (Djaenuri. 2015).

Kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana faktor pendukung dilihat secara internal dan eksternal, begitu juga faktor penghambat dilihat secara internal dan eksternal. Dalam mengatasi faktor penghambat Kepemimpinan Walikota dalam mewujudkan visi pembangunan dilakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung dilihat secara internal dan eksternal.

Landasan yuridis yang dipakai terdiri dari landasan yuridis pusat yang berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Landasan yuridis pemerintah daerah terdiri dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga.

Sehingga terciptalah kepemimpinan walikota yang baik dalam mewujudkan visi pembangunan di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut dapat dilihat pada Kerangka Pemikiran dibawah ini.





## Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pemerintahan ada dua jenis yaitu *“field research approach”* dan *“library research approach”*. 2 (Dua) teknik pengumpulan data tersebut sangat berbeda, dimana *“field research approach”* adalah teknik pengumpulan data penelitian yang sepenuhnya dilakukan di lapangan, sedangkan *“library research approach”* adalah teknik pengumpulan data yang sepenuhnya dilakukan di dalam perpustakaan (Simangunsong, 2017).

Berdasarkan uraian di atas penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan *“field research approach”* yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pendekatan dan pengamatan di lapangan. Maka metode yang akan digunakan adalah pengumpulan data *“field research approach”* menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut yaitu :

Wawancara adalah suatu proses komunikasi langsung yang dilakukan peneliti kepada informan dalam bentuk Tanya jawab dalam mengumpulkan data.

“Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian” (Simangunsong, 2017).

Dalam penelitian kualitatif pemerintahan ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan dalam melakukan wawancara yaitu: a). Menyiapkan pedoman wawancara, b). Menyiapkan alat untuk wawancara. c). Mengatur waktu untuk wawancara.

Dalam pelaksanaan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara penelitian pemerintahan dilakukan dengan contoh pola kerja sebagai berikut: 1). Menetapkan informan penelitian, 2). Menetapkan rumah tema penelitian, 3). Menetapkan item pertanyaan berdasarkan tema, 4). Menetapkan klasifikasi pertanyaan berdasarkan informan, 5). Menetapkan hasil wawancara berdasarkan informan

Adapun rumah tema dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Rumah Tema Penelitian**

<b>Tema</b>	<b>Sub Tema</b>	<b>Sub-Sub Tema</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Kepemimpinan Wali kota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara	<b>1.1.</b> Teori Sifat	<b>1.1.1</b> Sifat <b>1.1.2</b> Perangai <b>1.1.3</b> Kemampuan
	<b>1.2.</b> Teori lingkungan	<b>1.2.1.</b> Waktu <b>1.2.2.</b> Tempat Kerja <b>1.2.3.</b> Keadaan Kota Sibolga
	<b>1.3.</b> Teori Pribadi	<b>1.3.1.</b> Berorientasi Pada Tugas <b>1.3.2.</b> Menjalin Kerja Sama <b>1.3.3.</b> Berorientasi Pada Bawahan
	<b>1.4.</b> Teori Interaksi dan Harapan	<b>1.4.1.</b> Aksi <b>1.4.2.</b> Reaksi <b>1.4.3.</b> Komunikasi

	1.5.	Teori Humanistik	1.5.1.	Motivasi
	1.6.	Teori Tukar Menukar	1.5.2.	Kebutuhan
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kepemimpinan Walikota Dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara	2.1.	Faktor Pendukung	1.6.1.	Memberi
	2.2.	Faktor Penghambat	1.6.2.	Menerima
3. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Kepemimpinan Walikota Dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara	3.1.	Upaya Langsung	2.1.1.	Internal
			2.1.2.	Eksternal
	3.2.	Upaya Tidak Langsung	2.2.1.	Internal
			2.2.2.	Eksternal

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2020

Adapun Informan dalam Penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

A. Informan Kunci (Key person) adalah :

1. Walikota Sibolga, sebagai informan ke 1
2. Sekertaris Daerah Kota Sibolga sebagai informan ke 2
3. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sibolga sebagai informan ke-3
4. Kepala BAPPEDA Kota Sibolga sebagai informan ke 4
5. Kepala bidang penelitian dan pengembangan BAPPEDA sebagai informan 5

B. Informan pendukung terdiri atas 5 (lima) tokoh di masyarakat Kota sibolga yaitu :

1. Tokoh Masyarakat Kota Sibolga sebagai infoman ke 6
2. Tokoh Agama Kota Sibolga sebagai infoman ke 7
3. Toko Pendidikan Kota Sibolga sebagai infoman ke 8
4. Tokoh perempuan Kota Sibolga sebagai infoman ke 9
5. Tokoh Pemuda Kota Sibolga sebagai informan ke 10

a. Observasi adalah kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian” (Simangunsong. 2017).

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa observasi adalah suatu kegiatan pengamatan yang dilakukan di lapangan untuk melihat keadaan atau kondisi yang terjadi untuk dapat mengumpulkan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi partisipasi sebab peneliti dalam melakukan pengamatan dengan melibatkan diri dalam kegiatan yang dilakukan di BAPPEDA Sibolga. Selain itu peneliti juga menggunakan observasi tidak terstruktur yaitu dengan mengembangkan hasil pengamatan peneliti dengan

membandingkan atau menyesuaikan antara kondisi di BAPPEDA dengan kondisi di lingkungan masyarakat.

- b. Dokumentasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dokumen Primer yaitu dokumen yang berhubungan langsung dengan peristiwa penelitian yang dilakukan dalam pengambilan data secara wawancara dan Dokumen Sekunder yaitu dokumen yang mengacu pada dokumen pemerintah pusat maupun dokumen pemerintah daerah, dan yang lebih hebat lagi semua dokumen yang dipakai dalam kajian pemerintah berangkat dari naskah akademis. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh oleh peneliti adalah data dokumentasi dari website resmi Kota Sibolga, RPJMD Kota Sibolga 2016-2021, dan LKPj Kota Sibolga 2019.

## **Kepemimpinan Walikota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara**

### ***Perspektif Teori Sifat***

Sifat Walikota Sibolga dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yaitu gigih, *open minded*, pekerja keras, berintegritas, bertanggung jawab, konsisten, berwawasan, responsive, tegas, luwes dan memiliki toleransi. sifat yang dimiliki walikota sibolga termasuk kedalam sifat-sifat pemimpin yang diungkapkan oleh Djaenuri. Sifat-sifat walikota tersebut berfungsi untuk membuat perumusan rencana pembangunan yang transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga.

Secara umum sudah menunjukkan perangai yang baik yaitu perangai Walikota Sibolga yakni beliau merangkul seluruh SKPD Kota Sibolga, masyarakat dan dengan para stafnya, mampu mengontrol emosi, tenang dalam mengambil keputusan. Selalu sistematis dalam pelaksanaan program pembangunan dan berpedoman pada aturan, sosok yang santun dalam bertindak dan berucap, ramah terhadap para staf dan masyarakat, peduli terhadap para staf dan masyarakat, tegas terhadap para staf yang melanggar aturan, memiliki semangat kerja yang tinggi. Perangai tersebut dapat menjadi dasar bagi kepemimpinan walikota sibolga dalam perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk mengarahkan dan mengelola perubahan sosial, ekonomi daerah dan fisik wilayah kota sibolga. Namun Walikota Sibolga juga memiliki kekurangan yaitu kurang disiplin dalam pengaturan waktu.

Kemampuan yang dimiliki oleh Walikota Sibolga dalam kepemimpinannya yaitu kemampuan berkoordinasi dan bersinergis dengan seluruh OPD maupun dengan organisasi vertikal dan masyarakat. Kemampuan menjalin *networking* pada tingkat wilayah dan nasional,

memiliki kemampuan perencanaan yang baik dalam pembuatan sebuah program, kemampuan dalam berkomunikasi dua arah dengan seluruh OPD, para pegawai dan masyarakat, kemampuan menyesuaikan diri dengan masyarakat dan merangkul masyarakat. Atas dasar Kemampuan yang dimiliki oleh Walikota Sibolga dapat menjadi modal dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga.

### ***Perspektif Teori Lingkungan***

Walikota Sibolga sudah memimpin Kota Sibolga sejak dua periode dimulai periode pertama pada tahun 2010 sampai tahun 2015 dan periode kedua dimulai pada tahun 2016-2021. Pada masa kepemimpinan walikota sibolga di periode kedua dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2016-2021, rata - rata program pembangunan mengalami peningkatan akan tetapi ada juga beberapa yang tidak mengalami peningkatan seperti indikator kinerja pada opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Sibolga, jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi.

Secara umum tempat kerja Walikota Sibolga sudah mendukung kepemimpinan beliau dalam mewujudkan visi pembangunan dengan memiliki 23 OPD dan aparatur pemerintah yang membantu Walikota Sibolga dalam melaksanakan program pembangunan Kota Sibolga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga, serta hubungan baik yang terjalin antara Walikota Sibolga dengan seluruh OPD dan para staf. Namun dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum optimal karena masih ditemukan para staf kurang disiplin.

Kota Sibolga berada di diantara pesisir pantai dan pegunungan membuat Kota Sibolga memiliki potensi daerah yang beragam, akan tetapi posisi Kota Sibolga yang berada diantara pesisir pantai dan pegunungan mengakibatkan Kota Sibolga menjadi daerah rawan bencana. Kota Sibolga terdiri dari masyarakat yang beragam suku dan agama dengan hidup rukun berdampingan sehingga mengakibatkan Kota Sibolga jarang terjadi konflik sosial khususnya terkait SARA. Secara keseluruhan Keadaan atau Kondisi Kota Sibolga sudah mendukung Walikota Sibolga dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017.

### ***Perspektif Teori Pribadi***

Walikota Sibolga sudah berorientasi pada tugas yang terlihat dalam melaksanakan program pembanguan beliau bertanggung jawab dan terencana, beliau melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan dengan meminta laporan

pertanggung jawaban dalam pelaksanaan program pembangunan kepada seluruh organisasi perangkat daerah Kota Sibolga melalui BAPPEDA Kota Sibolga.

Walikota Sibolga Dalam menjalin kerja sama dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dan seluruh staf dalam pengambilan keputusan, turun langsung ketengah-tengah masyarakat, aktif dalam organisasi-organisasi, dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh OPD, para staf dan masyarakat Kota Sibolga. Melalui cara tersebut walikota sibolga sehingga dapat bersinergi untu mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga. Beberapa kerjasama yang pernah dilakukan oleh Walikota Sibolga yaitu kerjasama dengan pemerintah pusat rangka pengembangan Pelabuhan Sambas Kota Sibolga, Kerjasama dengan perguruan tinggi Politeknik Negeri Lampung (POLINELA) dalam rangka mendirikan Akademi Komunitas Negeri yang menjadi perguruan tinggi pertama di Kota Sibolga yang berstatus negeri dan Kerjasama dengan kementrian PUPR terkait program KOTAKU, kerjasama dengan iuwash usaid dalam rangka pembuatan master meter untuk memperoleh pasokan air bersih di daerah elevasi tinggi atau dataran tinggi.

Walikota Sibolga dalam kepemimpinannya menunjukkan sudah berorientasi pada bawahan dengan memberikan motivasi kepada para staf dan masyarakat Kota Sibolga, melibatkan para staf dan masyarakat Kota Sibolga dalam menentukan sasaran pembangunan dan melaksanakan program pembangunan dan menciptakan hubungan kekeluargaan dengan para staf dan masyarakat Kota Sibolga.

### ***Perspektif Teori Interaksi dan Harapan***

Aksi yang dilakukan WaliKota Sibolga yaitu melakukan blusukan atau turun langsung kepada masyarakat; ketika terjadi bencana banjir di Kota Sibolga walikota turun langsung untuk memberikan bantuan kepada korban banjir dan ikut bergotong royong untuk membersihkan sisa banjir; dalam pendidikan beliau membuka kelas unggulan untuk tingkat SMP dan SMA dan memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa dan uang jalan untuk siswa yang berhasil lulus Perguruan Tinggi Negeri; dalam bidang keagamaan beliau membentuk Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB); membuat kegiatan MTQ bagi agama islam dan PESPARAWI (Pesta Paduan Suara Gerejawi) yang dilakukan setiap tahunnya; dan mendirikan sentra pengolahan hasil tangkap perikanan mengingat Kota Sibolga merupakan daerah pesisir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh Walikota Sibolga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga yang maju, sejahtera dan berdaya saing.

Secara umum para pegawai dan masyarakat Kota Sibolga sudah memberikan reaksi positif terhadap kepemimpinan Walikota Sibolga dalam mewujudkan visi pembangunan yaitu

melalui ikut berpartisipasi aktif dan bekerja sama dalam melaksanakan program pembangunan Kota Sibolga. akan tetapi reaksi yang di berikan oleh para pegawai dan masyarakat masih belum optimal terhadap kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 sebab masih ditemukan para pegawai dan masyarakat yang apatis dan tidak mau berpartisipasi dalam melaksanakan program pembangunan Kota Sibolga.

Komunikasi dilakukan secara langsung melalui komunikasi formal dan komunikasi informal. Walikota Sibolga mengkomunikasikan rencana pembangunan kota sibolga dan program-program pembangunan Kota Sibolga. Komunikasi formal dilakukan dengan seluruh OPD dan para pegawai sedangkan komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat Kota Sibolga dilakukan melalui komunikasi informal. Dalam mengkomunikasikan visi pembangunan dan program pembangunan Kota Sibolga selalu disampaikan dalam apel pagi, rapat serta pertemuan dengan memosisikan diri terhadap dengan lawan bicara yang mengedepankan kekeluargaan dan menggunakan tutur bahasa yang santun dan mepu. Komunikasi yang dilakukan oleh Walikota Sibolga dengan seluruh OPD dan masyarakat bertujuan untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan para staf dan masyarakat Kota Sibolga dalam pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga.

### ***Perspektif Teori Humanistik***

Cara Walikota Sibolga dalam memotivasi seluruh OPD, para pegawai dan masyarakat dengan memberikan penghargaan kepada OPD atau staf yang berprestasi, memberi bimbingan dan pelatihan agar para pegawai dan masyarakat memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya, memberi promosi jabatan dan kenaikan pangkat kepada para staf. Walikota Sibolga memotivasi masyarakat dengan cara meningkatkan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan, memberikan rasa aman, menyediakan sarana dan prasarana publik kepada masyarakat. Motivasi yang diberikan oleh Walikota Sibolga berdampak pada kinerja OPD Kota Sibolga yang diwakili oleh BAPPEDA Kota Sibolga dalam melaksanakan program pembangunan Kota Sibolga dengan indikator kinerja rata-rata meningkat dari tahun 2016-2021.

Pemenuhan kebutuhan dalam kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga dilakukan dengan memberikan memberikan gaji dan insentif kepada para staf, memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada para staf, memberikan jaminan sosial baik

kesehatan maupun keselamatan kerja bagi para staf dan masyarakat, memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat baik tunai maupun non tunai. Memberikan subsidi buku pelajaran di seluruh sekolah yang ada di Kota Sibolga, memberikan bantuan pendidikan berupa beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan uang transportasi bagi siswa yang berhasil masuk PTN, menyediakan fasilitas dan sarana serta prasarana bagi para bawahan dan masyarakat, memberi subsidi listrik bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu walikota sibolga melaksanakan program pembangunan Kota Sibolga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga.

### *Perspektif Teori Tukar menukar*

Cara Walikota Sibolga dalam memberikan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh para pegawai dan masyarakat dalam kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga dengan terlebih dahulu mengumpulkan data dan informasi terkait yang dibutuhkan oleh para staf dan masyarakat dari seluruh OPD di Kota Sibolga, kemudian beliau turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui secara langsung terkait yang dibutuhkan oleh masyarakat, menentukan strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan dengan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh OPD untuk menetapkan prioritas kebutuhan para staf dan masyarakat dan menetapkan sasaran, kemudian memberikan yang dibutuhkan oleh para staf dan masyarakat dengan mendelegasikannya kepada seluruh OPD.

Para staf dan masyarakat memberi dukungan terhadap kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga dengan bekerja secara maksimal dan penuh tanggung jawab, mau diajak bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program pembangunan Kota Sibolga dengan terlaksananya program-program pembangunan Kota Sibolga sehingga visi pembangunan Kota Sibolga dapat terwujud.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepemimpinan Walikota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara**

Faktor pendukung internal kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara yaitu Komunikasi antar instansi dan masyarakat, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan berorganisasi dan lingkungan kerja. Faktor pendukung internal kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan

menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara yaitu potensi daerah yang dimiliki Kota Sibolga dan dukungan politik.

### **Faktor Penghambat Kepemimpinan Walikota dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara**

Faktor penghambat internal kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara yaitu kurangnya anggaran, rendahnya sumber daya Manusia, dan perbedaan pandangan politik.

Faktor penghambat eksternal kepemimpinan walikota dalam mewujudkan visi pembangunan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara yaitu luas wilayah kota sibolga yang sempit, masih ditemukan masyarakat yang apatis atau tidak berpartisipasi aktif dalam membantu Walikota Sibolga untuk melaksanakan program pembangunan.

### **Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Kepemimpinan Walikota Dalam Mewujudkan Visi Pembangunan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara**

#### ***Upaya Langsung***

Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program pembangunan Kota Sibolga, meningkatkan dan menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, melakukan pendekatan humanis kepada para staf dan masyarakat Kota Sibolga, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan program pembangunan Kota Sibolga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga.

Melakukan dan memberikan palatihan kepada para pegawai dan masyarakat untuk meningkatkan keahlian dan sumber daya manusia Kota Sibolga, meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Sibolga, dan mempromosikan Kota Sibolga melalui pelaksanaan kegiatan “Sibolga Ekspo” kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Kota Sibolga kepada investor sehingga mau diajak bekerja sama dalam melaksanakan program pembangunan sehingga visi pembangunan Kota Sibolga.

#### ***Upaya Tidak Langsung***



Meningkatkan dan menyediakan sarana prasarana dan fasilitas publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sehingga visi pembangunan Kota Sibolga dapat diwujudkan.

Memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap program pembangunan agar lebih efektif dan mempermudah walikota sibolga untuk melakukan pengawasan sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

### **Kesimpulan dan Saran**

Walikota Sibolga harusnya memiliki sifat-sifat baik yang dapat dipertahankan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan guna untuk mewujudkan visi pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 di Kota Sibolga, selain itu hendaknya manajemen waktu dapat diperbaiki. Kepemimpinan Walikota Sibolga selama dua periode sudah selesai, walaupun masa kepemimpinan menjadi kepala daerah sudah selesai hendaknya Walikota Sibolga tetap terus berkarya untuk kebaikan Kota Sibolga.

Hendaknya evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan lebih ditingkatkan, dengan cara menambah kerjasama dengan berbagai pihak di setiap sektor pembangunan sehingga visi pembangunan dapat tercapai. Motivasi yang diberikan kepada para staf dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan dengan para staf dan masyarakat Kota Sibolga, Selain itu Walikota Sibolga hendaknya menjalin komunikasi yang lebih intensif lagi dengan para bawahan dan masyarakat guna mendukung segala aktifitas yang sedang berjalan dalam perusahaan.

Perlu dilakukan pengawasan terhadap pemberian yang dibutuhkan oleh para staf dan masyarakat agar tepat sasaran agar yang diberikan tepat sasaran. Para staf dan masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program pembangunan Kota Sibolga dengan begitu dapat membantu Walikota Sibolga dalam kepemimpinannya untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sibolga.

### **Daftar Pustaka**

- Djaenuri, Aries. (2014). *Kepemimpinan, Etika & Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Djaenuri, Aries. (2015). *Kepemimpinan, Etika & Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia

Indonesia.

Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta : Rajawali Pers.

Simangunsong, Fernandes. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Di Kota Sibolga.

<https://sibolgakota.bps.go.id/sibolga-dalam-angka2020>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 Pukul 16.00

<https://sibolgakota.go.id/home/walikota-pimpin-rakerpem/>. Diakses Pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 14.30

<https://www.tapanulipst.com/sumut/sibolga/10021/sampaikan-lkpj-2019-wali-kota-sibolga-paparkan-kemajuan-pembangunan/>. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 13.00